



**PERKEMBANGAN PERMINYAKAN INDONESIA: PERTAMINA
MENGHADAPI KRISIS KEUANGAN DAN KORUPSI
PADA ERA BOOMING MINYAK
TAHUN 1966-1976**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Umi Zaenab
NIM 13030113120012**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Umi Zaenab menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain; baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, Maret 2018

Penulis,

Umi Zaenab
NIM 13030113120012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Satu ons praktik lebih berharga daripada satu ton teori

Mahatma Gandhi

Kenyamanan adalah penjara kebebasan dan hambatan untuk berkembang

John F. Kennedy

Dipersembahkan untuk:

Keluarga tercinta,
sahabat, teman seperjuangan
dan Almamater

Disetujui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407111990011001

Skripsi dengan judul “Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era Booming Minyak 1966-1976” yang disusun oleh Umi Zaenab (13030113120012) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada , Maret 2018.

Ketua,

Anggota I,

Dr. Endang Susilowati, M.A.
NIP 195905 161988112001

Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407 111990011001

Anggota II,

Anggota III,

Dr. Haryono Rinardi, M. Hum.
NIP 196703111993031004

Dra. Sri Indrahti, M.Hum.
NIP 196602151991032001

Mengesahkan,
Dekan

Dr. Redyanto Noor, M. Hum.
NIP 19590307 198603 1002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era Booming Minyak 1966-1976”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada ummat yang begitu dicintainya dan yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Khusus kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan, baik moral dan materil, penulis ucapkan terimakasih banyak atas semuanya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Sejarah pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada saat penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan berupa pengajaran, arahan, kritikan, dan pengalaman dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini izinkan penulis menyebutkan satu per satu orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Bapak, dan keluarga yang telah memberikan dukungan moril, materil serta semangat selama ini.
2. Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan dengan telaten membimbing penulis, memberikan arahan, bekal ilmu serta mendampingi dan senantiasa membantu kesulitan penulis dalam menyusun penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A. selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.

5. Segenap dosen penguji Dr. Endang Susilowati, M.A., Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum., Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., dan Dra. Sri Indrahti, M.Hum yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.
6. Segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa.
7. Segenap staff administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro khususnya mbak Fatma, mas Oscar, dan pak Romli yang telah membantu memberikan pelayanan secara maksimal sehingga memudahkan jalannya penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro khususnya angkatan 2013 kelas A, B, C yang telah berjuang bersama-sama selama proses bimbingan dan penyelesaian skripsi yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di SMA Pondok Modern Selamat khususnya Angkatan 18 "*strength eighteen*", yang selalu memberi bantuan tenaga dan waktu serta menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama untuk Arsyil Azhiim dan Sairil Umam yang senantiasa menemani dalam sedih dan duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulisan maupun substansi, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
RINGKASAN	xix
SUMMARY	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II INDUSTRI PERMINYAKAN INDONESIA SAMPAI	20
TAHUN 1965	
A. Perminyakan Era Kolonial dan Pendudukan Jepang	20
B. Perminyakan Indonesia Pasca Kemerdekaan, Masa Revolusi	29
C. Menjadi Tuan di Rumah Sendiri	31
D. Pembentukan Perusahaan Minyak Nasional	34
1. Pembentukan PT. Perusahaan Minyak Nasional	35
(P.T. PERMINA)	
2. Pembentukan P.N. Pertamina	37
E. Kontrak Karya Sebagai Wujud Pelaksanaan UU	39
Pertambangan Minyak	
BAB III KEBANGKITAN INDUSTRI MINYAK NASIONAL DI	43
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PADA MASA	
TRANSISI DARI ORDE LAMA HINGGA ORDE BARU	
A. Kontrak Bagi Hasil/ <i>Product Sharing Contract</i>	43

B. Pengintegrasian Permina dan Pertamina Menjadi Pertamina	46
C. Ekspor Minyak Bumi Indonesia	53
D. Indonesia Menjadi Anggota OPEC (<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>)	57
BAB IV PERUSAHAAN TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA MENGHADAPI KRISIS KEUANGAN DAN KORUPSI	65
A. Era Booming Minyak bagi Indonesia	65
B. Korupsi Merajalela	68
C. Krisis Keuangan	82
D. Kebijakan Pemerintah Menangani Krisis	90
BAB V SIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AS	:	Amerika Serikat
ASEAN	:	<i>Association of South East Asia Nations</i>
ASUS	:	Asisten Negara Urusan Khusus
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BI	:	Bank Indonesia
BPM	:	<i>Bataafsche Petroleum Maatschappij</i>
DWT	:	<i>Deadweight tonnage</i>
ETMSU	:	Eksplorasi Tambang Minyak Sumatra Utara
IIAPCO	:	<i>Independent Indonesian American Petroleum Company</i>
IMM	:	<i>Internasional Maritime Management</i>
LAAPLN	:	Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri
Letkol	:	Letnan Kolonel
LNG	:	<i>Liquefied natural gas</i> (gas alam cair)
NIAM	:	<i>Nederlandsche Koloniaal Petroleum Maatschappij</i>
OAPEC	:	<i>Organization of Arab Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pekuneg	:	Pemeriksa Keuangan Negara
Permina	:	Perusahaan Minyak Nasional
Pertamina	:	Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PN	:	Perusahaan Negara
PSC	:	<i>Produc Sharing Contrac</i>
PT	:	Perseroan Terbatas

PTMRI : Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia
SK : Surat Keputusan
SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
USA : *United States of America*

DAFTAR ISTILAH*

<i>Barrel</i>	: Satuan volume minyak bumi
<i>Calo</i>	: Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar
<i>Crude Oil</i>	: Minyak mentah berupa cairan coklat kehijauan sampai hitam yang terutama terdiri dari karbon dan hidrogen.
<i>Cut Off</i>	: Pemisahan catatan transaksi periode saat ini dengan periode tahun berikutnya dengan tujuan untuk memeriksa apakah transaksi- transaksi telah dicatat sesuai dengan tanggal/waktu pisah batas yang telah ditentukan, sehingga pencatatan telah dilakukan pada periode akuntansi atau tahun buku yang tepat.
<i>Defisit</i>	: Kondisi dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan
<i>Demurage</i>	: Waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan Untuk barang impor dengan batas waktu dihitung sejak proses bongkar peti kemas dari sarana pengangkut/ kapal hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan
<i>Devisa</i>	: Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri
<i>Direksi</i>	: Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

- Divisi* : Bagian di dalam perusahaan yang menangani suatu bidang tertentu dan memiliki fungsi serta kewenangan masing-masing, dipimpin oleh seorang kepala divisi (manajer) yang bertugas untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap divisi yang di pimpinya
- Distribusi* : Kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).
- Domestik Bruto* : Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun
- Eksplorasi* : Penyelidikan dan penjajakan daerah yang diperkirakan mengandung mineral berharga dengan jalan survei geologi, survei geofisika, atau pengeboran untuk menemukan deposit dan mengetahui luas wilayahnya
- Embargo* : Larangan lalu lintas barang pada negara tertentu
- Freight Cost* : Ongkos angkut pengeluaran untuk memindahkan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli
- Interest Fee* : Biaya yang ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya dalam penggunaan dana bank; biaya ini biasanya ditetapkan dalam persentase per tahun
- Investasi* : Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan

*Pengertian dalam daftar istilah in disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

- Kolonel* : Perwira menengah tertinggi satu tingkatan di atas Letnan Kolonel dan satu tingkat di bawah Brigadir Jenderal
- Konsensi* : Pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan. Model konsesi umum diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta (KPS) atau kontrak bagi hasil
- Kontraktor* Orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang di kontrak atau di sewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi/ lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan, yang telah melakukan penunjukan secara resmi Berikut aturan-aturan penunjukan, dan target proyek ataupun order/pekerjaan yang di maksud tertuang dalam kontrak yang di sepakati antara pemilik proyek (owner) dengan kontraktor pelaksana.
- Nampo Rioso* Satuan Tugas Minyak yang
- Butai*
- Neraca* : Bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada saat tertentu.
- Orde Baru* : Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998

- Orde Lama* : Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959.
- Revinancing* : Mengganti suatu pinjaman yang telah miliki dengan pinjaman lain. Subkontraktor
- Supply* : Jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga.
- Wesel* : Surat pembayaran yang dapat diuangkan ke bank oleh pemegangnya

DAFTAR GAMBAR

Gambar:		Halaman
2.1	Balikpapan Kota Minyak, Pusat Pertempuran dan Saksi Lautan Api.	24
3.1	Suasa Pembukaan OPEC di Bali.	61

DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
2.1	Daftar Perusahaan Minyak Asing Dalam Kontrak Karya Dalam Masa Orde Lama	41
3.1	Presentase Kesempatan Kerja Nasional pada 1971	49
3.2	Produksi Minyak Mentah dari Tiap Perusahaan (Agustus 1970)	51
3.3	Armada Tanker Pertamina pada 1969 (permina)	52
3.4	Ekspor Minyak Mentah Indonesia 1970-1975 (negara tujuan, barel, presentase)	56
3.5	Cadangan Minyak Dan Jumlah Penduduk Negara Opec pada 1970-an	63
3.6	Tingkat Produksi dan Cadangan Minyak Opec pada 1975	64
4.1	Bonus Pertamina Dari Kontraktor Pada Tahun 1968	75
4.2	Daftar Anak Perusahaan Patungan dan Perusahaan Patungan yang didirikan pada periode tahun 1965-1969	78
4.3	Perbandingan RUU Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional 1970	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	Tugas Umum Pertamina	107
B	Daftar Kontrak Minyak 1971-1972	108
C	Laporan Operasi dan Laba Bersih Pertamina 31 Desember 1974- 31 Desember 1975(tidak diaudit).	114
D	OPEC Ancam Perusahaan Minyak barat: Embargo Ekspor Minyak	121
E	Daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan Pertamina	112
F	Pemberian Kredit Bank Indonesia kepada Pertamina lewat Presiden, 11 Maret 1976.	123
G	Pemberian Kredit Bank Indonesia kepada Pertamina lewat Presiden, 11 Maret 1976.	123
H	<i>Inter Maritime Managemen SA.</i> 9 Desember 1976	134
I	Surat dari Menteri Pertambangan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia	143
J	Produksi minyak mentah Indonesia 1969-1974	134
K	Ekspor Bahan Tambang 1969-1972	144

RINGKASAN

Skripsi dengan judul Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era Booming Minyak 1966-1976. Masalah yang akan dikaji yaitu: 1) Bangkitnya Perkembangan perusahaan perminyakan Indonesia sebelum tahun 1965; 2) Bagaimana posisi Pertamina setelah adanya kontrak bagi hasil dalam perdagangan minyak dan internasional, meskipun Indonesia mengalami era *booming* minyak. 3) Mengapa Pertamina menghadapi krisis keuangan tahun 1974-1975; 4) Bagaimana usaha-usaha Pemerintah menghadapi krisis tersebut. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu; a) heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber skunder. b) kritik sumber, proses yang dilakukan untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. c) interpretasi menafsirkan dan menyusun antara fakta satu dengan lainnya. d) historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu politik dan ilmu ekonomi untuk mengkaji kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan Pertamina dan menganalisis apa saja yang menjadi penyebab krisis keuangan Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo.

Sejak tahun 1968 Pertamina menjadi satu-satunya Perusahaan Milik Negara yang mengelola penambangan minyak di Indonesia. Pertamina diharapkan mendukung program dan lembaga Pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Pembangunan. Embargo minyak OPEC berdampak pada industri minyak Indonesia, dan membuat era *booming* minyak sekitar 1970 hingga 1973. Peningkatan devisa melalui sektor minyak telah meningkat sebesar 70%. Namun pada akhir 1974 hingga 1975, Pertamina masuk ke masa krisis. Karena Pertamina tidak bisa melunasi utang jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh dewan direksi Pertamina yang menyebabkan utang Pertamina dalam jumlah besar.

Krisis Pertamina ini diawali dengan pengungkapan Pertamina telah gagal membayar hutang pada waktu yang telah dijadwalkan. Perkiraan nilai aset yang diakuisisi dan biaya kotor akuisisi Pertamina harus diaudit namun Pemerintah Indonesia tidak mempunyai informasi akuntansi dari Pertamina dan Pemerintah Indonesia tidak bisa menembus keuangan Pertamina. Pertamina mengoperasikan enam sistem akuntansi yang tidak terkoordinasi. Pertamina menghabiskan biaya jutaan dolar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tetapi tidak diimbangi dengan aset riil. Pemerintah Indonesia mengambil alih dan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang Pertamina yang jumlahnya sangat besar sebelum akhir September 1975. Dengan demikian negara harus menanggung beban krisis utang yang tinggi.

SUMMARY

This minor thesis is entitled Indonesia Petroleum Development: Pertamina Facing the Financial Crisis and Corruption in the Oil Booming Era 1966-1976 (Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era Booming Minyak 1966-1976). In this minor thesis, there are several problems that will be discussed to include: 1) The development of Indonesian petroleum companies before 1965; 2) What is Pertamina's position after the sharing of production sharing contracts in oil and international trade, even though Indonesia is experiencing an era of oil boom. 3) Why the Government faced the 1974-1975 Pertamina crisis; 4) How the Government's efforts dealt with the crisis. To examine the problem is used a critical historical method consisting of four stages, namely; a) heuristics, seeking and collecting historical sources, both primary and secondary sources. b) source criticism, the process undertaken to gain source authenticity and credibility. c) interpretation interpret and compile between facts with each other. d) historiography, the process of rewriting historical events. Thus, in writing this paper using the approach of political science and economics to examine the policy of government policy to overcome financial crisis Pertamina and analyze what causes the financial crisis Pertamina under the leadership of Ibnu Sutowo.

Since 1968 Pertamina has become the only State-Owned Company that manages oil mining in Indonesia. Pertamina is expected to support the programs and institutions of the New Order Government in the implementation of Development. OPEC oil embargoes impacted the Indonesian oil industry, and made an oil boom era from 1970 to 1973. The increase of foreign exchange through the oil sector has increased by 70%. However, in late 1974 to 1975, Pertamina went into crisis. Because Pertamina can not pay off short-term debt and long term. In addition, there are indications of corruption perpetrated by the Pertamina board of directors that caused Pertamina's large debts.

Pertamina crisis begins with the disclosure Pertamina has failed to pay the debt at the scheduled time. The estimated value of the acquired asset and the gross cost of the acquisition of Pertamina must be audited but the Government of Indonesia does not have any accounting information from Pertamina and the Government of Indonesia can not penetrate Pertamina's finances. Pertamina operates six uncoordinated accounting systems. Pertamina spends millions of dollars spent by the Government of Indonesia but is not offset by real assets. The Indonesian government took over and repayed Pertamina's short-term and long-term debts before the end of September 1975. Thus the state had to bear the burden of the high debt crisis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pada 1970-an Indonesia termasuk berada di barisan depan dalam pengembangan minyak dunia. Pertamina yang merupakan perusahaan minyak negara mengawasi lebih dari 20 perusahaan minyak di Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak bagi hasil. Pertamina memenuhi kebutuhan minyak di pasaran dalam negeri dan luar negeri. Produksi minyak Indonesia terus meningkat, dalam periode yang sama harga minyak dunia juga mengalami peningkatan. Berdasarkan presentase pendapatan nasional, kontribusi minyak mengalami peningkatan dari 5% pada tahun 1966 menjadi 31% pada tahun 1971.¹

Minyak dan fluktuasi harganya memberikan pengaruh yang sangat vital pada hampir semua aktivitas makroekonomi, karena minyak merupakan salah satu energi utama yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam memproduksi barang dan jasa. Minyak menjadi sumber energi teratas untuk menopang proses produksi dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Fluktuasi harga minyak sangat sensitif dengan kondisi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di setiap negara dan tidak ada satu negarapun yang tidak tergantung pada minyak dan mampu secara serta merta menurunkan konsumsinya akibat kenaikan harga.²

Melonjaknya harga minyak disebabkan oleh peperangan di Timur Tengah sehingga menimbulkan kekacauan politik dan tindakan boikot dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) yaitu sebuah organisasi yang bertujuan menegosiasikan

¹Anthony Goldstone “What Was the Pertamina Crisis?” *Journal Southeast Asian* (Insitutte of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1977), hlm. 122-132.

²Djisman Simanjutak, “Kemungkinan Kenaikan Harga Minyak Bumi”, *Prisma*, Agustus 1971, hlm. 7.

masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak.³

Pemerintah Indonesia mengalami era *booming* minyak yang sangat menguntungkan karena harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam. Namun demikian, Pertamina justru menghadapi krisis keuangan pada era ini. Produksi minyak yang tinggi dan kebutuhan minyak yang masih rendah membawa Indonesia menjadi Negara ketujuh yang bergabung dengan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Indonesia bergabung tepat setelah Qatar dan lima Negara pendiri, yaitu Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela.

Pada awal 1970-an terjadi perubahan revolusioner dalam perimbangan kekuatan dalam masalah penguasaan minyak. Perusahaan-perusahaan barat yang berpuluh-puluh tahun telah menguasai dunia perminyakan dari mulai eksplorasi hingga pemasaran minyak mulai terdesak. Dengan adanya embargo yang dilakukan oleh OPEC menjadikan harga minyak naik dan minyak menjadi langka atau biasa disebut krisis minyak dunia.

Naiknya harga minyak dalam periode krisis minyak memberikan keuntungan yang relatif sangat besar kepada Indonesia. Kekurangan pasokan minyak di seluruh dunia mengakibatkan harga komoditas minyak di pasar global melonjak dalam waktu singkat. Pada saat itu arus kas Pertamina sangat besar. Semakin lama, Pertamina melakukan pinjaman jangka pendek, dan mengandalkan kas Pertamina untuk melakukan pembayaran hutang.

Krisis keuangan Pertamina menjadikan perekonomian Indonesia terpaksa berkonsentrasi pada krisis Pertamina setidaknya selama satu tahun, Posisi hutang internasional Indonesia dengan cepat berubah dari kuat menjadi goyah karena tekanan politik dan keberpihakan Pemerintah yang diakibatkan oleh jatuhnya Pertamina. Pemerintah Indonesia harus membayar hutang jangka pendek. Perubahan tersebut, menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal ini, maka skripsi ini akan mengkaji perubahan yang terjadi akibat krisis minyak

³³Djisman Simanjutak, "Kemungkinan Kenaikan Harga Minyak Bumi", *Prisma*, Agustus 1971, hlm. 8.

tersebut dalam kajian historis. Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perkembangan perusahaan perminyakan Indonesia dari masa kolonial hingga orde baru ?
2. Bagaimana posisi Pertamina setelah adanya Kontrak Bagi Hasil?
3. Mengapa Pertamina mengalami krisis keuangan yang seharusnya memberikan surplus untuk Indonesia pada era *booming* minyak ?
4. Bagaimana usaha-usaha Pemerintah menghadapi krisis tersebut?

B. Ruang Lingkup

Setiap peristiwa sejarah selalu memiliki lingkup spasial dan temporal (ruang dan waktu), keduanya merupakan faktor yang membatasi gejala sejarah tertentu sebagai suatu kesatuan.⁴ Ruang lingkup ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan mudah, lebih relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵ Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup yakni lingkup temporal, lingkup spasial dan lingkup keilmuan, ketiga batasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Scope spatial atau ruang lingkup geografi membatasi kajian geografis dari sisi atau tempat terjadinya peristiwa. Batasan *spatial* yang digunakan dalam penulisan ini yaitu nasional, karena dalam peristiwa ini mencakup banyak melibatkan unsur negara sehingga menyebabkan dinamika dalam stabilitas nasional. Menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dikeluarkan pada 15 September 1971, Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi nasional yang bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi,

⁴Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 130.

⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Madar Maju, 1990), hlm. 19.

eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta penjualan pada tingkat nasional.⁶

Ruang lingkup temporal merupakan pembatasan kurun waktu terjadinya peristiwa yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini memiliki batasan waktu 1965 sampai 1976. Tahun 1965 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa tahun ini merupakan pertama kali penerapan Kontrak Bagi Hasil. Dasar bagi hasil tersebut adalah karena investasi yang membutuhkan biaya yang sangat besar, 100% ditanggung penuh oleh Kontraktor. Negara sama sekali tidak menanggung kerugian, bila kontraktor tidak menemukan cadangan migas di perut bumi, meski kontraktor sudah mengeksplorasi bertahun-tahun dan sudah menghabiskan dana yang cukup besar. Kerugian tersebut 100% penuh menjadi tanggungan kontraktor.

Antara tahun 1966 dan 1975, sekitar enam puluh kontrak bagi hasil telah ditandatangani dan sampai akhir tahun 1975, diperkirakan US \$ 4 miliar diinvestasikan ke sektor minyak. Antara tahun 1967 dan 1974, produksi meluas tiga kali lipat, mencapai rata-rata 1-5 juta barel per hari.⁷ Tahun 1976 dijadikan batas akhir pada penelitian ini dengan alasan pada tahun ini Ibnu Sutowo diberhentikan oleh Presiden Soeharto dan digantikan oleh Piet Harjono dikarenakan krisis keuangan Pertamina sehingga Pertamina mempunyai hutang US\$ 10,6 miliar berdasarkan audit pemerintah. Kemudian masa Piet Harjono telah dilakukan perubahan organisasi berdasarkan Keppres RI Nomor 44 tahun 1975 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.⁸

Adapun ruang lingkup keilmuan dalam skripsi ini adalah sejarah politik ekonomi. Sejarah ekonomi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis suatu aktivitas ekonomi dalam bidang perminyakan yang dilakukan oleh Pertamina dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri maupun di luar negeri.

⁶Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara.

⁷ Anthony Goldstone, "What Was the Pertamina Crisis?" *Journal Southeast Asian Affairs*, (Insitutte of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1977), hlm. 122-132.

⁸ R. Djokopranoto, *Merajut Karya Mengukir,,* hlm. 79.

Adapun lingkup politik karena penelitian ini juga menganalisis unsur-unsur kebijakan politik dalam hal kebijakan-kebijakan politik yang diputuskan oleh pemerintah dalam usaha mengatasi krisis Pertamina.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, untuk memperjelas fokus analisis, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yang *pertama*, menjelaskan perkembangan perminyakan Indonesia sebelum tahun 1966. *Kedua*, mendeskripsikan kedudukan perusahaan minyak di Indonesia sebagai penopang pembangunan ekonomi pada masa orde baru. *Ketiga*, menganalisis dampak berkembangnya perusahaan minyak negara terhadap krisis keuangan ditengah *booming* minyak yang seharusnya mendatangkan keuntungan karena krisis minyak dunia, minyak bumi Indonesia bisa di ekspor ke luar negeri, karena pada saat itu minyak bumi Indonesia melimpah yang seharusnya mendatangkan keuntungan bagi Indonesia justru sebaliknya Pertamina berhutang milyaran juta dolar pada bank luar negeri. *Keempat*, memaparkan bagaimana usaha pemerintah Indonesia menangani krisis keuangan Pertamina.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Pertamina menghadapi krisis keuangan dan korupsi pada era *booming* minyak penting untuk dilakukan, karena sejauh penelusuran penulis hingga saat ini belum ada kajian yang membahas secara deskriptif-analitis dan komprehensif tentang krisis keuangan dan korupsi Pertamina yang ditimbulkan dari periode *booming* minyak bagi Indonesia. Penyebab-penyebab korupsi atau krisis keuangan serta bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan yang berdampak bagi perekonomian Indonesia serta posisi Pertamina setelah dilanda krisis keuangan pada periode kepemimpinan Ibnu Sutowo, berikut dengan latar belakang krisis keuangan Pertamina serta *setting* historis tentang kiprah Pertamina bagi pembangunan Indonesia dimasa orde baru.

Beberapa kajian atau tulisan baik yang berkaitan dengan Pertamina dan krisis keuangan serta peran dan kebijakan pemerintah dalam menangani krisis

Pertamina penting untuk dikemukakan di sini. Antara lain sebagai referensi atau informasi ilmiah yang relevan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini, tinjauan pustaka terhadap kajian tersebut perlu dikemukakan agar bisa diketahui sisi-sisi mana saja yang belum dan telah ditelaah, supaya penulis dapat menunjukkan orisinalitas kajian dari skripsi ini.

Buku *pertama*, adalah *Pertamina dari puing-puing ke masa depan refleksi & visi, 1957-1997*.⁹ Buku yang diterbitkan oleh Humas Pertamina ditulis oleh Taufiq Ismail, Rais M.A. dan Hamid Jabbar. Secara garis besar buku ini membahas dengan cukup komprehensif mengenai sejarah dan dinamika Pertamina. Buku ini memberikan deskripsi tentang refleksi Pertamina dari latar belakang terbentuknya perusahaan minyak masa kolonial hingga masa kejayaan minyak Indonesia hingga orde baru.

Relevansi buku *pertama* terhadap skripsi ini yaitu, buku ini dapat memberikan gambaran untuk mendeskripsikan *setting* historis perkembangan perusahaan minyak bumi nasional dari masa kolonial hingga masa orde baru.

Perbedaan yang mencolok dan mendasar antara pustaka tersebut dengan skripsi yang penulis susun ini ialah lingkup temporal dan fokus kajian. Skripsi ini akan mendeskripsikan perkembangan Pertamina menjadi sumber utama penghasilan devisa negara bahkan hingga memiliki hutang jangka pendek pada bank luar negeri pada masa orde baru.

Pustaka yang kedua adalah buku yang berjudul *Pertamina Perusahaan Minyak Nasional*, karya Anderson G. Bartlett dkk.¹⁰ merupakan buku yang memaparkan arti penting minyak bumi dan perusahaan minyak bumi untuk ekonomi dan pembangunan negara, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yaitu pembahasan mengenai perminyakan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru serta kebijakan

⁹Taufiq Ismail, *Pertamina Dari Puing-Puing Kemasa Depan Refleksi & Visi 1957-1997*, (Jakarta :Hupmas Pertamina,1997).

¹⁰Anderson G. Bartlett, *Pertamina Perusahaan Minyak Nasional* (Jakarta:Inti Idayu Pers, 1986)

pemerintah mengenai kontrak karya pada era Soekarno dan kontrak bagi hasil dalam era Soeharto serta daftar perusahaan asing yang melakukan kerja sama/ investasi di Indonesia yang baru saja merdeka. Secara kronologis, investasi perusahaan asing sebagai pembuka jalan kejayaan minyak Indonesia pada awal 1970-an, karena pendapatan negara bertambah.

Relevansi buku *kedua* terhadap skripsi ini adalah memuat penjelasan mengenai kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara di dunia secara ekonomi dan teknologi meskipun Indonesia baru merdeka, Indonesia mampu berinteraksi dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Jepang, dan Negara-negara Eropa.

Perbedaan antara buku *kedua* dengan skripsi ini yaitu, pembahasan dalam buku ini lebih memfokuskan kepada penjelasan mengenai keseluruhan pelaksanaan kegiatan perusahaan minyak negara dari produksi hingga distribusi serta alat dan aset yang dimiliki perusahaan minyak negara untuk produksi dan distribusi serta dinamika perubahan kebijakan dari setiap pemimpin direksi serta presiden. Berbeda dengan skripsi ini yang pembahasannya lebih memfokuskan pada penjelasan mengenai ekspor/ distribusi minyak Indonesia ke luar negeri yang menghasilkan devisa bagi negara dengan jumlah banyak, namun memiliki banyak hutang.

Buku ketiga adalah *Merajut Karya Mengukir Sejarah Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan Sumbangasihnya Dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi*,¹¹ yang ditulis oleh Richardus Djokopranoto, Soejono Endropetro, Sri Widharto dan diterbitkan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ahli Minyak. Buku ini berisi sumbang asih para ahli minyak bumi Indonesia untuk mencari sumur minyak dan melakukan pengeboran yang mungkin banyak mengalami kegagalan.

¹¹R. Djokopranoto, Soejono Endropetro, Sri Widhanto, *Merajut Karya Mengukir Sejarah Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan Sumbangasihnya Dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ahli Minyak 2009).

Buku ini menjelaskan posisi perusahaan minyak nasional dengan diterbitkannya Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Minyak dan Gas bumi Negara, tugas dan kewajiban perusahaan minyak nasional dan peranan perusahaan minyak bagi bangsa Indonesia dan pencapaian perusahaan minyak nasional dalam pembangunann sebuah bangsa yang baru saja merdeka.

Perbedaan buku *ketiga* dengan skripsi ini yaitu, buku ini lebih memfokuskan peranan dan sumbang asih geologis/ahli minyak dalam perminyakan Indonesia, dan tokoh-tokoh dalam perminyakan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas perkembangan minyak dan direksi dari yang sederhana hingga kompleks serta fokus terhadap sebab dan akibat dari krisis minyak.

Pustaka yang keempat adalah buku yang berjudul *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Seri II: Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan Generasi Muda, Hukum, ABRI*.¹² yang diterbitkan oleh Yayasan Obor. Buku ini terdiri dari beberapa artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah khususnya pada era Orde Baru dan dugaan korupsi yang dilakukan Ibnu Sutowo dalam tubuh Pertamina serta kelambatan pemerintah dan lembaga hukum yang menangani kasus tersebut.

Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yaitu pembahasan dalam buku ini cukup luas dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam setiap artikel, karena buku ini memuat artikel dengan tema yang berbeda-beda namun tajam dalam menelaah setiap kasus, 40% artikel dalam buku ini fokus menyoroti kasus Pertamina khususnya pada tahun 1965-1970-an.

Relevansi buku *keempat* dengan skripsi ini yaitu, buku ini memberi penjelasan mengenai penyelewengan yang terdapat dalam direksi-direksi Pertamina yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo dan kritikan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto.

¹²Muchtar Lubis, *Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Seri II: Korupsi dan ekonomi, pendidikan dan generasi muda, hukum, ABRI* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1997).

Perbedaan antara buku *keempat* dan skripsi ini yaitu, buku ini sebagian besar fokus mengkritik pemerintahan Soeharto dan Lembaga Hukum yang cenderung bersifat objektif, berbeda dengan skripsi ini yang fokus pembahasannya adalah penyebab krisis dalam tubuh Pertamina dan usaha untuk menangani krisis tersebut.

Karya kelima adalah sebuah jurnal dari William Ascher yang berjudul *From Oil to Timber: The Political Economy off-Budget Development Financing in Indonesia*.¹³ Artikel ini memuat penjelasan mengenai pengalokasian dana dari sumber daya alam sektor minyak dan hutan, yang tidak dilakukan pencatatan akuntansi atau sebagai sumber dana *non-budgeting* pada era Orde Baru masa Pemerintahan Soeharto.

Kelebihan yang dimiliki artikel ini adalah pembahasan mengenai lalau-lintas keluar masuk kas keuangan negara salah satunya adalah Pertamina, namun tidak dilaporkan atau disetorkan kepada Pemerintah Indonesia dan dana-dan pembangunan dimana anggaran dibuat lebih besar daripada kebutuhan yang aslinya.

Relevansi artikel ini terhadap skripsi ini yaitu, artikel ini memberikan gambaran mengenai keuangan Pertamina yang korupsi di tubuh Pertamina sebagai penyebab krisis keuangan Pertamina, Pertamina menjadi sumber dana segar untuk Angkatan Darat, Pemerintah dan beberapa tokoh pemangku kepentingan pada saat Orde Baru.

Perbedaan antara artikel ini dengan skripsi ini yaitu pembahasan dalam artikel karya William Ascher sebagian besar fokus terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun era Soeharto dan pembiayaan dana kampanye politik 1971 yang memanfaatkan kekuatan politik dan sumber daya alam termasuk minyak bumi Indonesia. Berbeda dengan skripsi ini yang pembahasannya lebih memfokuskan pada penjelasan mengenai krisis keuangan Pertamina yang disebabkan karena keluar masuknya arus keuangan Pertamina yang carut marut dan tidak dilakukan

¹³Bruce Glassburner, "In the Wake Of General Ibnu: Crisis in the Indonesian Oil Industry", *Journal Asian Survey*, Vol. 16 No.12 (University California Press, 1976).

pengauditan. Skripsi ini juga menjelaskan usaha-usaha Pemerintah Indonesia dalam menangani krisis Pertamina.

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis dalam rekonstruksi sejarah adalah dapat menyajikan suatu kerangka pemikiran yang mencakup penggunaan berbagai konsep dan teori yang dipakai dalam membantu jalanya penelitian dan analisis.¹⁴ Sejarah sebagai kisah yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat tertentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat, sejarah memerlukan disiplin ilmu lain dalam proses pendekatan terhadap objek penelitiannya menggunakan dan memahami disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan objek penelitian sangatlah penting bagi seorang peneliti, sebab akan berguna untuk membantu menyeleksi sumber-sumber sejarah, menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas, menjelaskan kondisi, serta hubungan keterkaitan dan urutan fakta-fakta yang ditemukan atau dengan kata lain merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Langkah terpenting dalam rekonstruksi sejarah adalah penyusunan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori,¹⁵ darimana sudut pandang yang digunakan, berbagai dimensi mana yang diperhatikan, dan unsur-unsur apa saja yang harus dikupas.¹⁶ Mengacu dari pandangan tersebut, untuk menganalisis Pertamina dalam menghadapi krisis keuangan akan digunakan beberapa konsep yang terkait.

Secara konseptual pengertian perkembangan adalah suatu proses evolusi dari yang sifatnya sederhana ke arah sesuatu yang lebih kompleks melalui berbagai taraf diferensiasi yang sambung-menyambung. Dimulai dari perubahan-perubahan yang dapat ditelusuri sampai pada hasil peradaban akhir, didalam ke-*semuanya*

¹⁴Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2.

¹⁵Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2.

¹⁶Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial,,* hlm 4.

tersebut ada proses transformasi dari yang homogen ke heterogen dan ada faktor-faktor yang memengaruhi.¹⁷ Pertumbuhan dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari perubahan total aset yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa peningkatan maupun penurunan aset perusahaan dalam satu periode. Suatu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat menandakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang diperoleh. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang dimiliki bisa menghasilkan pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki.¹⁸ Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu: bentuk usaha (*company*) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dan jenis usaha (*business*) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara, perusahaan negara adalah suatu kesatuan produksi yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan negara ialah untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan

¹⁷Soejono Soekamto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 66.

¹⁸Efrika Prihandini, "Pengaruh free cash flow, pertumbuhan perusahaan kebijakan deviden, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2001-2015" (<http://repository.ump.ac.id/1550/3/EFRIKA%20PRIHANDINI%20BAB%20II>), diunduh pada 04.59 WIB, 11 Februari 2018).

kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materil dan spirituil.¹⁹

Keberadaan perusahaan negara sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi Perusahaan Negara adalah badan usaha atau perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.²⁰

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara. Pertamina adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tidak dibagi menjadi saham dan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan pertambangan dan komersialisasi minyak dan gas bumi di seluruh wilayah pertambangan Indonesia. Tugas dan kewajiban Pertamina adalah melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan semua eksploitasi minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk kemakmuran maksimal masyarakat dan negara serta menyediakan dan melayani kebutuhan domestik untuk produk minyak bumi dan gas bumi, yang diatur oleh Pemerintah.²¹

Perusahaan membutuhkan *management* untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi organisasi, *management* yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi meliputi manusia, finansial, fisik dan informasi dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam sebuah manajemen

¹⁹Departemen Keuangan Republik Indonesia “Lembaran Negara Republik Indonesia No.19.1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara” (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1960/19TAHUN~1960PERPU.HTM>, di unduh pada 12 Februari 2018 pukul 19.00).

²⁰Ariata Westra, *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1.

²¹Lebih lanjut lihat lampiran A.

dipimpin oleh *manager* yaitu seseorang yang bertanggung jawab melakukan proses *management* dalam suatu perusahaan.²² Jika dilihat dari konsep tersebut, *manajemen* dalam perusahaan minyak negara (Pertamina) dipimpin oleh seorang manajer/ Direktur Umum yaitu Ibnu Sutowo.

Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corrupts* yang secara harfiah berarti jahat atau buruk, sedangkan menurut *Webster's Third International Dictionary*, korupsi adalah perangsang terhadap seorang pejabat berdasarkan itikad buruk agar pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.²³

Pertamina berada dalam keadaan siklis, yaitu keadaan ketika kemajuan diikuti dengan kemunduran.²⁴ Pertamina mengalami kemajuan di bidang perminyakan dibuktikan dengan ekspor minyak ke luar negeri. Pada waktu Pertamina mengalami kemajuan, permintaan minyak bertambah dan menyebabkan kenaikan harga minyak dunia tinggi namun biaya produksi tetap dan kenaikan harga menyebabkan untung Pertamina bertambah dan disebut dengan *booming oil* namun kemajuan tersebut menyebabkan Pertamina mengalami kemunduran karena krisis keuangan dalam tubuh Pertamina.

Krisis keuangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengeluaran keuangan perusahaan lebih banyak daripada pendapatan, namun produksi tidak dapat diperluas lagi, dan pinjaman kepada bank luar negeri sudah jatuh tempo namun Pertamina tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman/ kewajibannya. Pada saat itu Pertamina terancam bangkrut (hampir gulung tikar), diikuti dengan kemunduran dibuktikan dengan adanya kemunduran dengan krisis keuangan.²⁵

²²Ricky W. Griffin, "*Manajemen, Jilid I*" (Boston, USA: Houghton Mifflin Company, 2002), hlm. 27.

²³Edy Herry Pryhantoro, *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial kontemporer* (Surabaya: Agra Vidya, 2016), hlm. 34.

²⁴R. Djoerban Wachid, *Pelajaran Ekonomi Catatan ke-13*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1980), hlm. 219.

²⁵R. Djoerban Wachid, *Pelajaran Ekonomi Catatan ke-13*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1980), hlm. 223.

Robert Klitgaard dalam bukunya “*Corrupt Cities*” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ia mengklasifikasikan korupsi menjadi dua; yaitu *freelance* dan sistematis. Tindakan korupsi dikategorikan *freelance* apabila individu atau kelompok mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya, yang mendukung terjadi penyuapan. Tindakan korupsi dikategorikan sistematis jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi politik.²⁶

Krisis keuangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jumlah hutang yang makin bertambah namun pendapatan tetap/ stagnan. F. Engels menggambarkan keadaan krisis seperti lalu lintas yang berhenti, pasar-pasar penuh barang, barang bertimbun-timbun dan tak dapat dijual, uang lenyap dari peredaran, kredit tak ada lagi.²⁷

Perkembangan Pertamina dengan mengeksport minyak ke luar negeri dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar diikuti dengan krisis keuangan dan inilah yang dalam hipotesis penulis telah mengindikasikan adanya korupsi dalam tubuh Pertamina, khususnya yang terkait dengan pengeluaran perusahaan yang tidak teraudit. Rangkaian konsep dan pemikiran inilah yang penulis gunakan untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik. Pendekatan ini berguna untuk menganalisis suatu tindakan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dikarenakan krisis keuangan Pertamina yang diduga terdapat korupsi dalam tubuh Pertamina. Korupsi yang dimaksud di sini adalah sebagai kejahatan keuangan, penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi dan kelompok, perilaku direksi Pertamina yang secara tidak sah dan tidak wajar

²⁶Edy Herry Pryhantoro, *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer* (Surabaya: Agra Vidya, 2016), hlm. 34.

²⁷Edy Herry Pryhantoro, *Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*, hlm. 34.

memperkaya diri sendiri dan teman-temannya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang.²⁸

F. Metode Penelitian

Ilmu sejarah memiliki metode penelitian yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya serta memiliki kekhasan tersendiri pada setiap tahapnya. Oleh karena hal tersebut tidaklah mengherankan jika metode sejarah diartikan sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.²⁹ Untuk menyusun skripsi dalam rangka mengikuti metode penulisan sejarah.³⁰ Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik merupakan langkah awal dari penelitian ini yang berisikan kegiatan pengumpulan sumber sejarah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan pencarian dan pengumpulan sumber ke berbagai tempat yang dinilai relevan dalam mengakses data yang dibutuhkan. Pengumpulan sumber dilakukan dengan metode penggunaan bahan dokumen. Penelitian bahan dokumen dilakukan di sejumlah perpustakaan dan lembaga kearsipan di Indonesia. Lembaga perpustakaan yang dikunjungi sebagai tempat penelitian adalah: PNRI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia), Perpustakaan Ibnu Sutowo (Perpustakaan Pertamina Pusat), Perpustakaan Ibnu Sutowo Pertamina Pusat Jakarta, Jogja Library Centre (JLC), Perpustakaan Kolese Santo Ignatius Yogyakarta, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Widya Puraya Universitas Diponegoro. Penelitian di lembaga arsip: ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Sumber sejarah yang diteliti meliputi: surat kabar-surat kabar sezaman, proses verbal, data kepemilikan aset, dan data-data hukum tentang perminyakan dan

²⁸Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2000), hlm. 12.

²⁹Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*, (Semarang: Unnes Press, 2007), hlm. 9.

³⁰Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975), hlm. 15.

gas bumi di Indonesia. Sumber primer diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) data ekspor impor minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 1972-1976 ketika pada saat itu Indonesia sedang menikmati masa *booming* minyak, sumber primer didapat dari (ANRI) Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 1957-1977 berita resmi terbitan pemerintah yang sezaman dan relevan dengan permasalahan Nasionalisasi, pembentukan organisasi Pertamina dan Indonesia bergabung dengan OPEC, berita dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ASSUS (Asisten Sekretaris Negara Urusan Khusus), Marzuki Arifin SE, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lambertus Nicodemus Palar, Ekubang. Sumber Primer selain berupa arsip dari koleksi *Arsip Delegasi*, *Arsip Konstitueante*, *Arsip Kabinet Perdana Menteri RI* dan *Arsip Kabinet Presiden RI*, Peraturan dan Undang-Undang merupakan sumber yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini antara lain UUD 1945, UUDS 1950, Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pertamina, Perminyakan dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah yang terkait. Terbitan sezaman juga menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini, terutama dari surat kabar dan majalah. Surat kabar sezaman tersebut antara lain: *Kompas*, *Pikiran Rakyat*, dan *Suara Merdeka*. Majalah sezaman meliputi: *Warta Pertamina*, *Prisma*, dan *Analisa*. Majalah *Prisma* dan *Analisa* diperoleh dari Perpustakaan Ignatius yang terletak di Kota Baru, Yogyakarta.

Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berfungsi untuk menentukan otentitas sebuah sumber sejarah. Kritik intern berfungsi untuk menentukan kredibilitas atau kebenaran dari informasi sebuah sumber sejarah.³¹ Dalam skripsi ini, kritik ekstern digunakan untuk meneliti keaslian sumber dari segi fisiknya, oleh karena banyaknya dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Kearsipan merupakan salinan dari aslinya, maka harus dikoroborasi dengan sumber lainnya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa kondisi sumber mulai dari cover, kertas, tulisan, dan segala bentuk yang mendeskripsikan

³¹Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), hlm. 24.

keaslian fisik dari sumber tersebut. Kemudian kritik intern dalam skripsi ini digunakan untuk meneliti keaslian sumber dari segi isinya, hal ini dilakukan dengan cara menganalisis isi sumber agar dapat dipercaya kebenarannya.

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta sejarah sumber-sumber yang ada, sehingga diperoleh pemahaman terhadap fakta tersebut. Fakta tersebut diperoleh dari hasil kritik ekstern dan kritik intern, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis terhadap peristiwa sejarah. Untuk menginterpretasikan suatu aktivitas masa lampau diperlukan sikap objektif yang sangat tinggi dengan meninggalkan sikap subjektif yang berlebihan. Dalam skripsi ini, tahap interpretasi dilakukan dengan cara menganalisis fakta sejarah yang relevan dengan korupsi dan krisis Pertamina yang kemudian disintesiskan melalui imajinasi, penafsiran, dan pendekatan untuk mencari hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan pendekatan ilmu politik dan ekonomi berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antar fakta korupsi dan krisis Pertamina dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hutang Indonesia.

Historiografi, merupakan penulisan sejarah. Dalam tahap ini fakta-fakta yang sudah diinterpretasikan, kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era *booming* Minyak 1966-1976” ini diawali dengan “*Pendahuluan*” atau Bab I, yang di dalamnya memuat hal-hal yang menjadi dasar dan panduan dalam skripsi ini, yaitu latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Berbagai persoalan penelitian yang diajukan dalam permasalahan pada Bab I, yang merupakan inti permasalahan dalam skripsi ini, akan dideskripsikan dan dianalisis pada Bab II sampai bab IV. Sebagai *setting* historis, skripsi ini

menguraikan tentang “*Perkembangan Perusahaan Perminyakan Negara Sebelum Masa Orde Baru*” didalam bab II, yang memuat seputar dinamika perusahaan perminyakan nasional dari masa kolonial, masa perjuangan hingga memasuki masa Orde Baru. Pembahasan ini disajikan untuk menggambarkan landasan historis beserta dinamika perkembangan perusahaan perminyakan Indonesia, supaya diperoleh pemahaman yang kontinuitas tentang eksistensi perusahaan perminyakan di Indonesia dari masa kemasa.

Pembahasan tentang “Kebangkitan Industri Minyak Nasional di Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Masa Transisi dari Orde Lama Hingga Orde Baru” akan disajikan dalam Bab III, yang mengkaji seputar penggabungan semua perusahaan minyak di Indonesia menjadi sebuah perusahaan Nasional yang terpadu dalam mengolah minyak dari hilir hingga hulu yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri. Selanjutnya, akan dibahas Kontrak Bagi Hasil (*Contract Product Sharing*) yang dapat menghasilkan produksi minyak meningkat sehingga Indonesia mampu mengeksport minyak ke luar negeri dan Indonesia masuk dalam dalam organisasi negara pengekspor minyak (OPEC).

Puncaknya, sebagaimana yang tertera dalam judul skripsi ini, fokus kajian dalam pembahasan terakhir ialah tentang “*Krisis Keuangan Pertamina dan Korupsi pada Era Booming Minyak*”. Bab IV ini akan menyajikan hasil analisis penulis terhadap krisis keuangan dan korupsi Pertamina dalam periode *booming* minyak yang harusnya menghasilkan keuntungan bagi Indonesia untuk pembangunan seluas-luasnya demi kepentingan rakyat Indonesia dan stabilitasi perekonomian Nasional, namun Pertamina dijadikan sapi perah Orde Baru di mana Pertamina membiayai proyek-proyek diluar bidang perminyakan dan membangun beberapa anak perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Pertamina menjadi tangan panjang Pemerintah untuk melakukan pinjaman-pinjaman luar negeri, dan menjadi sumber dana utama bagi Angkatan Darat hingga Pertamina mengalami krisis keuangan karena terlilit hutang jangka pendek pada salah satu bank di texas AS, dan karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Pertamina pada saat itu yaitu Jendral Ibnu Sutowo sehingga pemerintah turun tangan untuk

menyelsinki hutang Pertamina serta perekonomian Indonesia menjadi terfokus pada Pertamina.

Bab Lima merupakan bab Kesimpulan. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diajukan pada latar belakang permasalahan. Jawaban tersebut dibahas secara mendalam di bab dua, tiga, dan bab empat. Kemudian dijelaskan secara singkat melalui kesimpulan dalam bab Lima.